

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertujuan menetralsir dasar-dasar ideologis para kelompok militan maupun kelompok radikal. Deradikalisasi yang digunakan BNPT menjadi formula yang sedang dijalankan sekarang untuk mengatasi ancaman terorisme dan juga yang memiliki keterkaitan dengan para kelompok radikal. Deradikalisasi merupakan pendekatan baru dan juga sebagai penyeimbang dengan program lain yang dijalankan BNPT. Deradikalisasi merupakan media konseling dan media interaktif bagi para pelaku teror sebagai proses mengubah perilaku maupun persepsi yang mereka yakini yang melanggar norma hukum dan juga norma agama. Selain itu, deradikalisasi juga merupakan strategi dalam bentuk pencegahan arus radikalisme yang ada di masyarakat. Berangkat dari itu, BNPT dengan program deradikalisasi untuk memepermudah mencapai tagernya, dalam pelaksanaanya perlu melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini BNPT dipandang perlu menggandeng elemen masyarakat. Hal tersebut dilakukan, mengingat masalah terorisme, radikalisme, ekstrimisme, merupakan masalah bersama dan harus ada komitmen bersama dalam menanganinya.

Dari pembahasan diatas kita bisa kita bisa melihat bahwasanya radikalisme agama saat ini perlu tindakan serius untuk penanganannya. Dengan munculah program deradikalisasi sebagai upaya dalam menaggulangnya. Bisa kita jumpai dari pembahasan diatas juga, memperlihatkan baik dari BNPT, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama memiliki keragaman bentuk dan cara maupun konsep strategi serta instrumen yang digunakan dalam upaya melawan terorisme dan radikalisme agama. Walaupun terdapat perbedaan mengenai pandangan, dan konsep strategi deradikalisasi, sejatinya mereka memiliki tujuan yang sama yaitu, melawan gerakan teror atas nama agama. Maka dari itu dalam menanggulangi paham radikalisme agama perlu kerja sama yang apik antar unsur pemerintah dan non pemerintah agar penanggulangan radikalisme bisa efektif.

Seperti yang kita ketahui, dalam berbagai upaya untuk memberantas terorisme dan radikalisme, deradikalisasi menjadi salah satu jawaban yang diharapkan pemerintah melalui BNPT. Dalam hal tersebut pendekatannya lebih banyak dilakukan melalui keagamaan. Baik dengan menghadirkan pakar-pakar agama atau Ulama serta para kelompok akademis. Mengenai sikap dan perbedaan dalam menangani fenomena terorisme dan radikalisme, Muhammadiyah memutuskan tidak ikut terlibat dalam kerjasama deradikalisasi seperti NU dan LDII maupun ormas lain. Muhammadiyah lebih melihat dengan sudut pandang obyektif dan komprehensif dan menentukan strategi yang lebih tepat dalam

menanggulangi hal tersebut. Maka dari itu, Muhammadiyah sejak masa kepemimpinan Din Syamsuddin hingga saat ini, Muhammadiyah lebih menawarkan jalan moderasi. Muhammadiyah beranggapan kekerasan tidak harus selalu dihadapi dengan kekerasan pula bukan hanya asal eksekusi mati di tempat tetapi harus melalui proses hukum yang adil. Selain itu juga, tentunya dengan jalan yang *soft approach* atau *persuasif*. Lain hanya dengan Nahdlatul Ulama maupun ormas lain, yang pada akhirnya turut serta dalam kerjasama dengan BNPT dalam Program deradikalisasi. Pada tahun 2011, BNPT dan Nahdlatul Ulama melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut berisi tentang kerjasama program kontra-radikalisasi dan juga deradikalisasi.

Kebutuhan untuk mentransformasikan nilai-nilai serta sikap hidup damai di lingkungan pendidikan khususnya pendidikan Islam dirasa penting dalam upaya melawan paham dan perilaku yang menghalalkan kekerasan seperti terorisme dan radikalisme agama. Seperti yang kita ketahui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki lembaga pendidikan yang tersebar diseluruh Indonesia. Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, memiliki ciri khas utama adanya pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya, yang memuat materi-materi nilai-nilai perdamaian serta menyemai karakter Islam yang moderat, Islam yang berkemajuan bagi para anak didiknya. Sebagaimana kita ketahui Muhammadiyah dalam Peraturan PP Muhammadiyah No. 3 Tahun 2012 menetapkan selain kurikulum Nasional Muhammadiyah juga

menetapkan kurikulum sendiri khususnya dalam pendidikan agama yaitu Kurikulum Al-Islam, Kemuhamadiyah, dan Bahasa Arab. Dengan hal tersebut Muhammadiyah berusaha mentransformasikan nilai-nilai Islam moderat melalui pendidikan Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Misalnya, menurut Nurwanto dalam tulisannya mengenai Nilai-Nilai Perdamaian dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (Akhlak) disekolah Muhammadiyah menyebutkan bahwa, secara umum dalam buku teks pendidika Akhlak yang merupakan bagian dari pendidikan Agama Islam, menyajikan berbagai nilai positif dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai perdamaian. Lanjutnya, disajikan pula pengetahuan dalam mencegah dan mengatasi potensi dan aktualisasi konflik maupun tindak kekerasan dimasukan disetiap jenjang kelas ataupun semesternya (Nurwanto, *et al.*, 2015: 61).

Dilain sisi, Nahdlatul Ulama lembaga pendidikan Ma'arif NU mempunyai ciri khas tersendiri seperti pendidikan ASWAJA dan juga Ke-NU-an yang dirancang didalamnya mengusung Islam yang moderat. Dari rumusan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang sudah dipaparkan bab sebelumnya diatas, kita dapat melihat Nahdlatul Ulama dengan ideologi *Ahlussunnah wal Jama'ah* seperti konsep *tasamuh* (toleransi), *tawassut* (moderat), *tawzun* (seimbang) juga dikembangkan melalui kultur pendidikan mereka. Sehingga mata pelajaran Aswaja dan Ke-Nu-an, merupakan bentuk instrumen yang dilakukan NU dalam mengajarkan Islam yang damai dan toleran, Islam yang tengahan.

Dengan demikian, kajian ini memberikan gambaran bahwa radikalisme agama menjadi masalah bersama khususnya bagi Umat Islam dan generasi bangsa. Pendidikan Islam harus mampu mengarahkan siswa sesuai dengan semangat Islam yang mengajarkan saling menghargai dan Ukhuwah antar sesama. Oleh karenanya deradikalisasi paham keagamaan melalui pendidikan Islam sebagai salah satu cara menanggulangi terorisme dan radikalisme atas nama agama. Melalui jalur pendidikan Islam ini lebih bersifat *soft approach* sehingga mampu menyentuh pada persoalan yang sebenarnya. Maka, kebijakan pendidikan terkait keanekaragaman dan kemajemukan agama, perlu dirancang sistem pendidikan yang tidak hanya berbasis kognitif saja, tetapi bagaimana membentuk kesadaran beragama baik pada tataran pergaulan antar sesama dan juga kesejahteraan Umat.

Selain itu, kajian ini juga membuktikan bahwa Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama ikut berperan aktif walaupun dengan cara dan strategi masing-masing. Pada tataran konseptual terkait deradikalisasi paham keagamaan memang berbeda hingga pada teknik operasionalnya dilingkungan masing-masing. Namun pada intinya, sekolah dari platform masing-masing menjadi lahan untuk membangun karakter siswa agar mampu bersikap toleran, cinta damai, dan Islam yang selalu dinamis mampu membaca peta zaman dengan memahami, membandingkan dan perenungan atas realitas yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Materi-materi yang disajikan memberikan pemahaman terhadap keragaman disekitar kita dan memunculkan sikap positif dengan kelompok yang

berbeda menumbuhkan kesadaran realitas keberagaman di Indonesia sehingga meningkatkan solidaritas kebangsaan. sehingga memiliki pemahaman agama yang moderat dan terhindar dari arus radikalisisasi.

B. Saran

Seperti yang sudah diketahui upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPT secara umum sudah memberikan hasil positif. Namun dalam hal implementasi masyarakat pada umumnya belum begitu mengerti mengenai deradikalisasi tersebut. Terbukti salah satunya mengenai masih banyaknya kerancuan dalam hal pemaknaan konsep deradikalisasi yang dianggap sebagai de-Islamisasi atau pemberantasan terhadap umat agama tertentu. Maka, BNPT harus berusaha mencari cara yang lebih efektif dan mudah dipahami dalam mensosialisasikan program deradikalisasi agar tidak terjadi salah pemahaman. Selain itu diperlukanya ekstra kehati-hatian dalam penanganan kasus terorisme dan kelompok radikal agama agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kehidupan masyarakat.

Pengakan hukum yang lebih transparan dan seadil-adilnya juga menjadi bagian penting agar tidak ada kecurigaan satu sama lain terlebih dengan adanya kasus-kasus diatas yang bermotivaisi agama. Penegasan payung hukum terhadap lembaga-lembaga terkait penanggulangan terorisme dan radikalisme agar tidak saling tumpang tindih dan kerancuan dalam menjalankan tugas masing-masing. Dilain sisi, penegakan hukum

yang transparan perlu ditampilkan oleh para pengak hukum agar tidak memunculkan persepsi bahwa pemberantasan teroisme dan kelompok radikal terkesan pemberantasan terhadap umat tertentu.

Selain itu, Pendidikan Agama diharapkan memiliki peran strategis dalam menjawab setiap persoalan-persoalan sosial di masyarakat menjadi terkesan gagal dengan munculnya para kelompok-kelompok teroris dan radikal yang mengatasnamakan agama. Agama dijadikan jargon yang membius untuk berbuat sesuka hati tanpa memperhatikan moral dan etika. Maka, diharapkan pendidikan Agama haruslah menjadi ujung tombak persemaian nilai-nilai yang pluralis, inklusif, dan toleran yang diberikan kepada peserta didik sedini mungkin. Hal tersebut akan mudah terwujud ketika pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan juga dialogis dalam perbedaan. Maka Pemerintah juga harus lebih memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan Islam baik formal maupun informal seperti Pesantren maupun lembaga lainnya terlebih mereka merupakan aset penting yang bisa dijadikan saran dalam upaya penangkalan paham radikal dan terorisme agar tidak meluas dan menysasar msayrakat.

Perumusan kurikulum pendidikan Islam di sekolah menjadi sebuah keharusan. Kurikulum Pendidikan Islam yang mengajarkan ajaran Islam yang menghargai keberagaman dan perbedaan, serta mengarahkan pada peserta didik pada kehidupan yang ideal dan baik bagi seorang Muslim. maka perlu pemerintah mencari format ideal pendidikan Islam yang mampu memberikan hal tersebut. selain kurikulum, para pendidik dan juga

strategi pembelajaran yang digunakan juga harus dinamis tidak kaku dan mampu mengaktualisasikan dengan kondisi saat ini. sehingga bisa terwujudnya outcome yang diharapkan.

